



Catatan Dua Tahun Pemerintahan
Prabowo - Gibran Bidang Gender:

**Laporan Kekerasan terhadap
Perempuan Tertinggi dalam
Satu Dekade, Anggaran
Perlindungan Justru
Dipangkas**

Pemerintahan Prabowo–Gibran: Janji dan Target untuk Perempuan



Visi-misi Prabowo–Gibran

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dalam dokumen kampanye

- 1 **Asta Cita 1:** memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2 **Asta Cita 4:** memperkuat pembangunan SDM, ... kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 3 **Program Hasil Terbaik Cepat 1:** makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
- 4 **Program Prioritas 10:** penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Target RPJMN 2025–2029 (Perpres Nomor 12 Tahun 2025)

Indeks Ketimpangan Gender
0,421 (2024) → 0,394

Kesenjangan upah gender
22,09% → 17%

TPAK perempuan
naik ke 56,7–60,89%

Angka kematian ibu
189 (2020) → 77 per 100.000

Imunisasi HPV
cakupan 90%; pra-eliminasi
kanker serviks di 125 kab/kota

Median usia kawin pertama
naik ke 22,8 tahun

Perkawinan anak
turun ke 5,03%

Kekerasan seksual
turun ke 3,19%

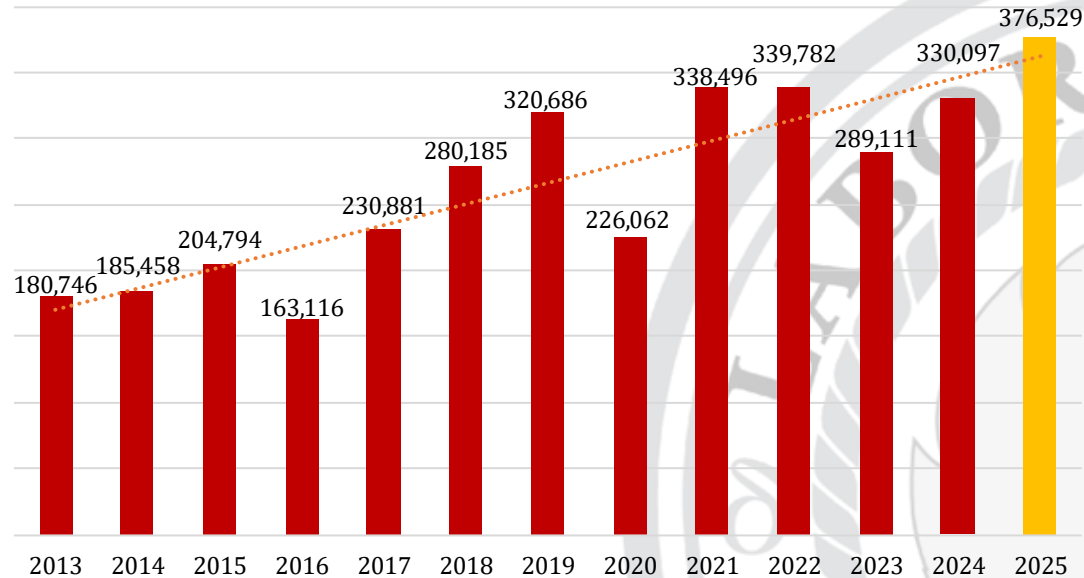
Perempuan 25+ lulus minimal SMA
naik ke 40,27%

Indeks literasi digital
naik ke 3,76

Komitmen tertulis lengkap, pelaksanaannya timpang: UU PPRT disahkan pada 21 April 2026, tetapi belum ada peraturan pelaksana; Anggaran perlindungan dipangkas dan Makan Bergizi Gratis (MBG) bergeser dari ibu hamil ke siswa. Untuk anak balita dan ibu hamil per tahun 2027 sebesar Rp33,54 T (14%), sedangkan untuk siswa Rp198,96 T (83%); IKG tidak menghitung kekerasan seksual yang mencapai puncaknya pada tahun 2025 (meskipun sudah ada PP Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan TPKS); Penyangkalan pemerkosaan massal 1998; Wacana menyatukan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI dalam revisi UU HAM.

Kekerasan terhadap Perempuan

Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan



Sumber: CATAHU Komnas Perempuan (2013-2025)

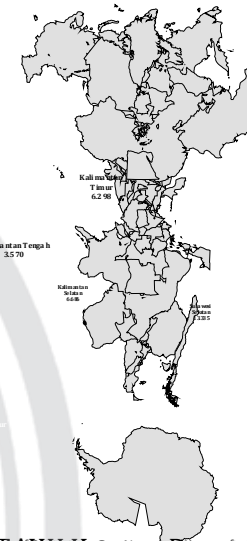
CATAHU Komnas Perempuan mencatat **376.529 kasus** Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) sepanjang 2025, naik 14,07% dari 2024 dan tertinggi dalam satu dekade. Hampir 9 dari 10 kasus (89,76%) terjadi di ranah personal; pelaku terbanyak justru orang terdekat, yaitu suami/istri dan pacar/teman.

Untuk ranah negara (2.707 kasus), CATAHU membagi KBGtP ke dalam **11 lingkup** (lihat rincian di samping). Di ranah ini, negara tercatat sebagai pelaku, bukan sekadar pihak yang gagal melindungi.

Pada saat yang sama, anggaran lembaga yang menangani korban terus menyusut. **Kasus naik dan anggaran turun** menjadi paradoks utama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Data KBGtP Berdasarkan Provinsi

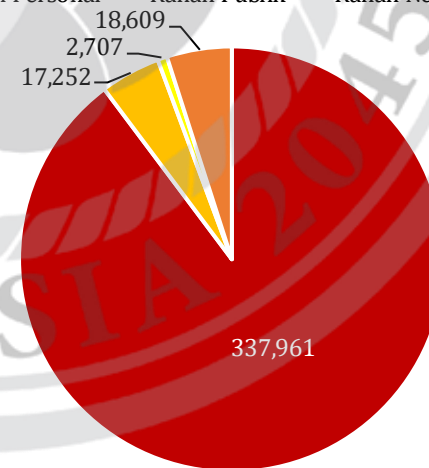
Jumlah KBGtP (Rendah ke Tinggi) .0 63441.0



Sumber: CATAHU Komnas Perempuan (2025), OpenStreetMap, Ovi

Data KBGtP Berdasarkan Ranah Kekerasan

■ Ranah Personal ■ Ranah Publik ■ Ranah Negara ■ NA



Sumber: CATAHU Komnas Perempuan (2025)

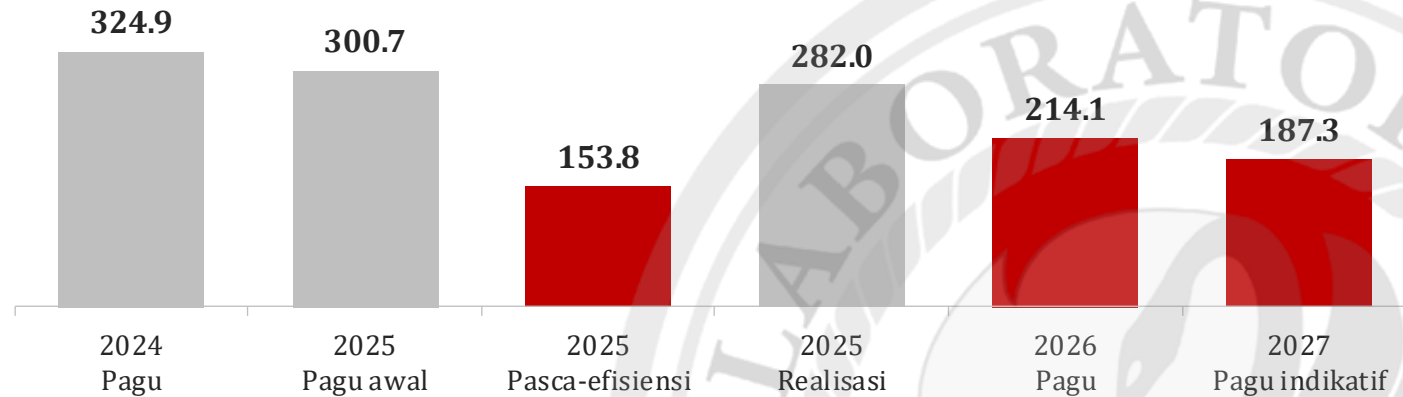
Lingkup KBGtP di Ranah Negara

Menurut CATAHU Komnas Perempuan

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum
2. Persekusi oleh Aparat
3. Kekerasan Seksual oleh Pejabat Publik
4. Konflik Agraria dan Tata Ruang
5. KBGtP dalam Konflik SDA
6. KBGtP Perempuan Pembela HAM
7. KBGtP Konflik Penggusuran
8. Kebijakan Diskriminatif
9. Penyiksaan
10. Pelanggaran Hak Perempuan Pekerja
11. TPPO Anak Perempuan

Anggaran: Kasus Naik, Anggaran Perlindungan Turun

Anggaran KemenPPPA (Rp miliar)



Rp240,2 T

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam RAPBN 2027; 97% untuk MBG

1 : 1.282

Pagu indikatif KemenPPPA tahun 2027 (Rp 187,3 M) dibanding pagu anggaran BGN tahun 2027 (Rp 240,2 T)

Anggaran BNPB



Rp49 M → Rp47 M

Anggaran untuk Komnas Perempuan 2026 → 2027, ketika kasus kekerasan naik 14,07%

-62,85%

Pemangkasan awal anggaran LPSK, pelindung korban kekerasan seksual, akibat efisiensi 2025 (Rp229 M menjadi Rp85 M). Tahun ini, dipangkas sekitar 24%.

KemenPPPA mengusulkan hingga **Rp392,5 miliar** untuk 2027, lebih dari dua kali pagu indikatifnya; Sementara di BNPB, pagu indikatif 2027 sebesar Rp1,6 M untuk Deputy Pencegahan BNPB; dana siap pakai Rp250 M (Dengan pola anggaran ini, negara membiayai akibatnya, bukan mencegah sebabnya).

Paradoks MBG dan BGN

43.838

korban dugaan keracunan di 36 provinsi, Jan 2025–Agu 2026 (JPPI)

62 juta

penerima MBG; rumah tangga lapar ekstrem hanya <1% (±800 ribu)

77%

penerima adalah siswa SD–SMA; jendela stunting ada di 1.000 HPK

Rp268 T

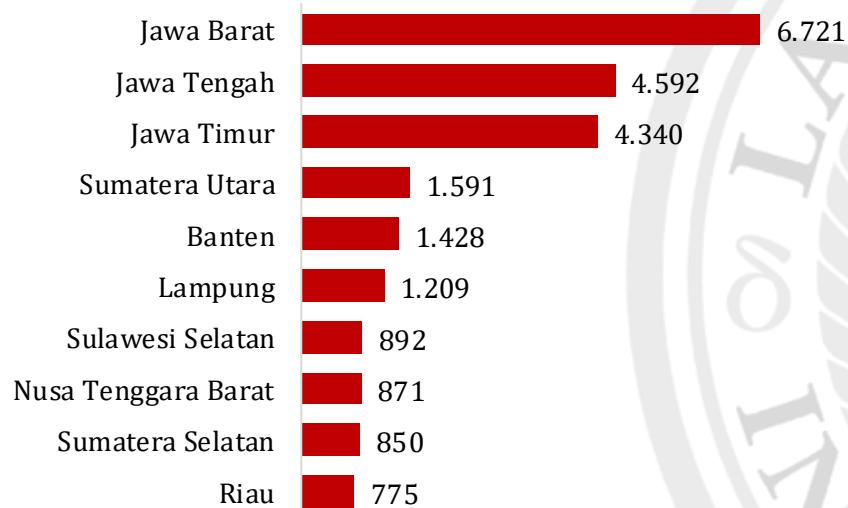
pagu BGN 2026, sekitar 7% APBN

61,6%

publik tidak puas dengan pelaksanaan MBG (survei SMRC)

Dapur (SPPG) Menumpuk di Jawa

10 provinsi dengan SPPG terbanyak per 9 Juni 2026



Rencana ke 3T: per 2 Oktober, Kepala BGN yang baru menyatakan 480 SPPG akan diaktifkan di wilayah 3T di 16 provinsi, seperti enam provinsi Papua hingga Maluku.

Celah Masalah

1

Ibu hamil dan menyusui terpinggirkan: stunting dicegah di 1.000 HPK, bukan di bangku SMA.

2

Perempuan Timur paling jauh dari dapur: dapur menumpuk di Jawa, padahal dampak terbesar di Timur.

3

Biaya peluang bergender: layanan publik terpangkas, beban perawatan pindah ke ibu.

4

Risiko ditanggung ibu: anak yang keracunan dirawat di rumah, umumnya oleh ibu.

Pimpinan BGN: Lebih Banyak Perempuan, tanpa Ahli Gizi

4 dari 9

kursi pimpinan perempuan (dulu 1/10)

6 → 1

kursi diisi unsur TNI/Polri

0

pimpinan berlatar ilmu gizi

Latar kesehatan hanya di satu kursi deputy. Kepala BGN kader Gerindra dan mantan asisten pribadi Presiden; Dadan Hidayana dan dua wakilnya menjadi tersangka dugaan korupsi (Jun 2026).

Dua desain: MBG vs PMT-AS 1997

Dimensi	MBG (2025–2026)	PMT-AS (1997)
Fokus dan sasaran	Bergeser antara lapar, gizi, dan stunting; dapur terkonsentrasi di Jawa	Kehadiran dan konsentrasi belajar; prioritas di luar Jawa–Bali
Pengelolaan	Terpusat, lewat mitra dapur SPPG baru	Dikelola sekolah, dimasak ibu PKK, bahan dari petani lokal
Pengawasan gizi	Dipegang lembaga nasional (BGN)	Bidan desa dan ahli gizi Puskesmas/Posyandu
Anggaran	Sangat besar: Rp268 triliun per tahun	Terbatas, di tengah krisis ekonomi 1997

Masalahnya bukan niat, melainkan desain: Rp268 triliun terlalu mahal untuk coba-coba yang berkepanjangan. Saat krisis 1997 negara memasak bersama komunitas. Kini, dengan Rp268 triliun, negara memasak sendiri.

Bencana Sumatera dan Karhutla Kalimantan: Respons “Netral Gender”

Bencana Sumatera: Jumlah Korban Besar

1.189

meninggal dunia

141

masih hilang

±489 ribu

pengungsi (26 Des 2025)

157.838

rumah rusak di 52 kab/kota

Karhutla Kalimantan: Napas Sesak

±96,5 ribu

ha terbakar di Kalbar, Kalteng, Kalsel

4

meninggal dan 324 luka berat

±17 juta

warga terpapar asap 42–55 hari

63.711

balita ISPA dari 283.270 kasus (7 provinsi)

Kronologi Respons Negara

- 1 Des 2025** Presiden menilai status bencana nasional tidak diperlukan.
- Des 2025** Sekitar 50 ribu personel TNI, Polri, dan Basarnas dikerahkan.
- 23 Des 2025** Komnas Perempuan mendesak status bencana nasional dan ruang aman bagi perempuan.
- 15 Okt 2026** Sidang di PTUN Jakarta: ahli menilai 4 dari 5 indikator bencana nasional terpenuhi.

Data Korban Karhutla per Provinsi

Provinsi	Luas terbakar (ha)	Warga terpapar asap	Hari berasap	Meninggal / luka berat
Kalimantan Barat	51.125	5,7 juta	54	1 / 9
Kalimantan Tengah	23.305	2,8 juta	55	3 / 313
Kalimantan Selatan	22.043	4,3 juta	46	0 / 2
Kalimantan Timur	5.761*	4,2 juta	42	0 / 0

Luas kumulatif per 12 Okt 2026 (BNPB); *Kaltim per 14 Sep 2026 (Kompas). Warga terpapar dan hari berasap: Agu–1 Okt 2026 (Greenpeace). Korban per 9 Sep 2026 (Kemenkes). Tidak satu pun data dipilah menurut jenis kelamin.

Beban yang Ditanggung Perempuan di Kedua Bencana (Temuan Komnas Perempuan)

- Data terpilah absen:** tidak ada data perempuan, ibu hamil, lansia, dan disabilitas untuk logistik di Sumatera; dampak karhutla terhadap perempuan juga tidak tercatat.
- Kesehatan reproduksi terancam:** air bersih dan pangan di pengungsian rentan; udara Kalteng berstatus berbahaya dan partikel asap dapat menembus plasenta.
- Kerja perawatan berlipat:** pemulihan tanpa dukungan khusus; ibu merawat balita ISPA dan anak sekolah daring tanpa upah; perempuan kepala keluarga kehilangan air dan lahan garapan.
- Nyaris tanpa pos pengaduan:** perempuan korban kekerasan di pengungsian tidak punya tempat melapor dan ruang aman.

Yang tidak dihitung tidak dilayani, dan polanya berulang: data korban BNPB tidak terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan disabilitas. 12 Okt 2026 pemerintah kembali menolak status bencana nasional karena “masih mampu”; pernyataan seperti “Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi” juga perlu disoroti.

Rekomendasi

1 Anggaran yang Melindungi

Tetapkan batas bawah anggaran KemenPPPA, LPSK, Komnas Perempuan, dan DAK Nonfisik PPA; penuhi usulan KemenPPPA 2027.

2 Akui Sejarah Kelam

Akui pemerkosaan massal Mei 1998 sebagai bagian sejarah bangsa; bantu korban dan keluarga penyintas.

3 Evaluasi Total MBG

Moratorium dapur bermasalah, buka data keracunan, ahli gizi dan kesehatan masyarakat di pimpinan BGN, usut tuntas korupsi.

4 Bencana Responsif Gender

Data terpilah, ruang aman, dan pos pengaduan di huntara Sumatera dan karhutla Kalimantan; pernyataan pejabat berperspektif gender.

5 UU PPRT dan Komnas Perempuan

Terbitkan aturan pelaksana UU PPRT; jaga independensi Komnas Perempuan dalam revisi UU HAM.

6 Peta Jalan dan Audit Gender

Peta jalan kesetaraan gender 2025-2029 dengan target terukur; audit gender di setiap K/L.





TERIMA KASIH